

TUGAS AKHIR

**PERSPEKTIF HUKUM DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN TATA RUANG
PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURABAYA**



OLEH:

AULIA PUTRI

NIM. 20191440035



Seminar Nasional Hukum dan Pancasila

Vol. 2, 9 Juni 2023



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2023

TUGAS AKHIR

**PERSPEKTIF HUKUM DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN TATA RUANG
PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURABAYA**

**“Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”**



OLEH:

AULIA PUTRI

NIM. 20191440035



Seminar Nasional Hukum dan Pancasila

Vol. 2, 9 Juni 2023



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Perspektif Hukum Dan Mekanisme Perencanaan Tata Ruang Permukiman Kumuh Kota Surabaya
Nama Mahasiswa : Aulia Putri
NIM : 20191440035

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 18 Juli 2023

Surabaya, 18 Juli 2023

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



(Dr. H. Agus Supriyo, S.H., M.Si.)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya





(Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aulia Putri
NIM : 20191440035
Judul Tugas Akhir : Perspektif Hukum Dan Mekanisme Perencanaan Tata Ruang Permukiman Kumuh Kota Surabaya

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 18 Juli 2023

Surabaya, 18 Juli 2023

Dewan Penguji :
Ketua Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. ()
Anggota Penguji : Dr. H. Agus Supriyo, S.H., M.Si. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



(Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.)



**Perspektif Hukum Dan Mekanisme Perencanaan Tata Ruang
Permukiman Kumuh Kota Surabaya**

Aulia Putri 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, auliaputri5112@gmail.com

Agus Supriyo 2

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, agussupriyo@um-surabaya.ac.id

Abstract

The rapid development of the city of Surabaya and population density in recent times has caused more and more slums to appear in various places. This shows the need for urban spatial planning in an effort to arrange slums in the city of Surabaya, with the basic law of Surabaya City Regional Regulations. Good urban spatial planning can help in arranging slum arrangements in the city of Surabaya. Slum arrangement is one of the efforts to improve the quality of the environment and provide better access for residents to meet their daily needs. However, the arrangement of slums also requires careful planning and based on applicable law, so as to avoid potential conflicts and violations of human rights. Through juridical analysis, it was found that Surabaya City Bylaw provides a strong legal basis for urban spatial planning and slum arrangement. In an effort to organize slums in the city of Surabaya, it is necessary to increase public awareness of the importance of maintaining cleanliness and environmental health. In addition, local governments must also strengthen urban spatial planning by involving various related parties and paying attention to social, economic, and environmental aspects in every stage of planning. This legal study aims to analyze the juridical aspects of urban spatial planning in an effort to arrange slums in the city of Surabaya.

Keywords: Local regulation, spatial planning, slum

Abstrak

Perkembangan kota Surabaya yang pesat dan kepadatan penduduk dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan semakin banyaknya permukiman kumuh yang muncul di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan perlu adanya perencanaan tata ruang kota dengan hukum dasar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang menyediakan kerangka terpadu untuk perencanaan penggunaan lahan di kota Surabaya. Perencanaan tata ruang kota dapat membantu dalam menata penataan permukiman kumuh di kota Surabaya. Permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sehingga penataan permukiman kumuh merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan akses yang lebih baik bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penataan permukiman kumuh juga memerlukan perencanaan yang matang dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari potensi konflik dan pelanggaran



terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu diimbangi dengan mekanisme hukum Perencanaan tata ruang permukiman kumuh yang baik untuk mengatur tata ruang suatu wilayah guna mencapai efisiensi, keinginan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kajian yuridis normatif ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan dari peraturan yang berlaku untuk permukiman padat penduduk yang tergolong kumuh di kota Surabaya.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Tata Ruang, Pemukiman Kumuh.



Pendahuluan

Hukum di negara Indonesia sangat mengatur apa yang disebut tempat tinggal. Tempat tinggal adalah suatu tempat dimana seseorang ataupun keluarga dapat beristirahat dan menetap baik secara permanen maupun sementara. Dalam suatu penafsiran hukum kata tempat tinggal itu sendiri memiliki makna kaidah hukum yaitu sebuah bangunan sebagai tempat hunian. Tempat tinggal yang kita kenal berupa rumah, rumah susun, apartemen, gedung dan jenis tempat tinggal lainnya. Sesuai dengan bunyi ke-5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Sehingga Kepemilikan sebuah hunian atau rumah pantas menjadi sebuah perhatian lebih negara dalam untuk mensejahterakan warganya, yang terdapat sifat kepentingan tidak mengesampingkan jaminan sosial, jaminan sehat, dan jaminan pendidikan.(Chandranegara and Bakhri, 2021) Jadi sudah seharusnya Konstitusi negara Indonesia melindungi hak setiap warga negara dengan kepemilikan tanah dan bangunan.

Pada kota Surabaya sendiri dapat dilihat bahwasanya permasalahan tempat tinggal merupakan masalah utama di kota pahlwan ini. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, pembangunan infrastruktur dan perubahan sosial-ekonomi dapat menyebabkan kekurangan tempat tinggal yang mengkhawatirkan. Penipisan di kota Surabaya ini mengacu pada pengurangan jumlah ruang dan lahan yang digunakan untuk perumahan, baik di rumah padat penduduk maupun rumah terpisah.(Ernawati, 2019) Kekurangan tempat tinggal memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dampaknya adalah kemungkinan tinggal di daerah kumuh, kenaikan harga rumah, ketidakstabilan sosial dan akses yang tidak merata ke fasilitas dan layanan publik.(Iswantoro and Anastasia, 2013) Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani secara serius dengan pendekatan hukum yang tepat.

Pesatnya perkembangan kota dan kepadatan penduduk yang menimbulkan berbagai masalah pada kota besar di Indonesia termasuk Surabaya. Penyebab kepadatan penduduk adalah urbanisasi, karena faktor ekonomi mereka bermigrasi dari desa-desa kecil di Jawa Timur banyak yang memilih ke kota Surabaya. Sehingga, kawasan kota memiliki daya tarik sendiri untuk para masyarakat yang berasal dari desa untuk mencari pekerjaan dan menetap seperti Surabaya(Harahap, 2013). Banyaknya masyarakat urban yang mencari pekerjaan di Kota Surabaya, masih menjadi masalah baru untuk meningkatkan angkatan kerja yang belum di barengi oleh lapangan kerja terbaru.(Agustina Melani, 2020) Hal itu semua demi Selain merefleksikan pengalaman serta peluang bagi masyarakat, juga menandakan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesejahteraan dan kesehatan, pekerjaan, pendidikan hingga berpartisipasi dalam penegakan demokrasi(Nazaruddin, 2018). Karena sedikitnya lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan masyarakat harus bekerja lebih keras untuk bertahan hidup, sehingga masyarakatpun memilih permukiman yang sesuai dengan penghasilannya.(Hidayat *et al.*, 2017)

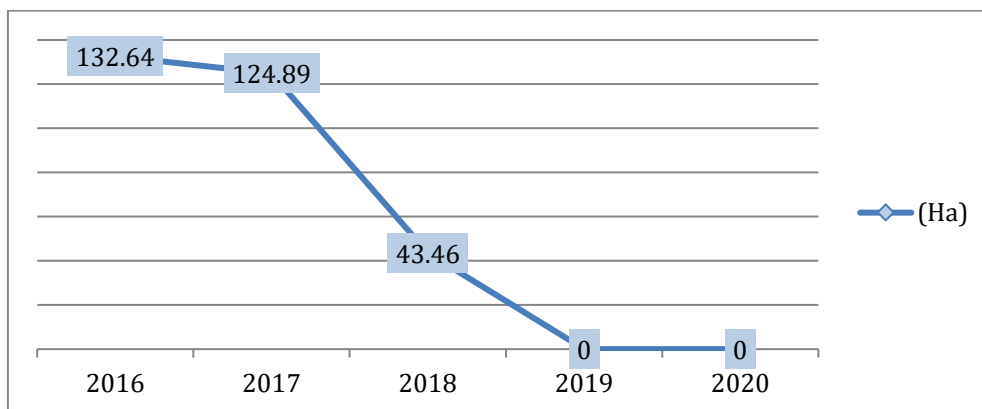
Melihat dari banyaknya masyarakat di desa yang bermigrasi ke kota, maka sudah seharusnya setiap kota memiliki pengelolaan tata ruang kota yang berjalan secara baik. Dikarenakan sebuah tata ruang atau Perencanaan wilayah merupakan bagian penting dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Mengembangkan dan menerapkan aturan penggunaan lahan yang efektif adalah kunci penggunaan lahan yang optimal dan memastikan penggunaan

lahan yang tepat dalam pembangunan perkotaan. Menjadi kota besar ke-2 di Indonesia, Kota Surabaya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan dan penggunaan tanah di wilayahnya. Namun, implementasi peraturan tata ruang tidak selalu berjalan sesuai harapan dan seringkali menghadapi berbagai tantangan.

Jika menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 1 point (13) definisi permukiman kumuh adalah “*permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat*”.(Republik Indonesia, 2011) Maka dapat disimpulkan sangat sejalan dengan kondisi beberapa permukiman padat masyarakat di kota Surabaya. Persebaran kawasan yang terbilang kurang baik di kota Surabaya masih terbilang belum teratasi contohnya di kawasan Kapasari Surabaya Pusat, Bulak Banteng, Ampel hingga pesisir. Kawasan tersebut dihuni oleh penduduk dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur yang kurang memadai, kepadatan penduduk yang tinggi, akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi, serta minimnya akses terhadap fasilitas publik seperti jalan raya, trotoar, dan taman . Selain itu, kawasan ini cenderung memiliki bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan seperti berdempetan sehingga rawan terbakar serta adanya masalah sosial seperti kemiskinan, sehingga rawan kejahatan sosial.

Sejalan dengan peraturan diatas, di dalam kota Surabaya pada kawasan kumuh juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang menyebutkan bahwasanya kriteria kekumuhan dapat meliputi berbagai aspek seperti bangunan, lingkungan, air bersih, drainase, pengelolaan limbah, kebersihan hingga tingkat rawan kebakaran daerah tersebut.(Kota Surabaya, 2018) Kriteria tersebut sangat sesuai dengan realita di lapangan. Dapat ditemukan beberapa kawasan kota Surabaya yang masih meninggalakn permasalahan tersebut hingga saat ini. Namun data dari pemerintah kota Surabaya menyebutkan bahwasanya kota Surabaya bebas dari lingkungan kumuh terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dan berikut adalah data yang menunjukkan perkembangan luas permukiman kumuh di kota Surabaya dari tahun 2016-2020 :

Table 1 Total Kawasan Kumuh Kota Surabaya



Source: Bappedalitbang.surabaya.go.id(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2021)



Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tata ruang dan permukiman kumuh di kota Surabaya menimbulkan beberapa bahan data untuk penelitian kali ini. Seperti pada beberapa permukiman kumuh seperti di daerah Semampir kota Surabaya yang mempunyai masalah sanitasi di daerahnya yang di akibatkan padatnya suatu pemukiman. (Sukrisdiyanto and Setiadi, 2024) Begitu juga dengan kawasan tambaksari, dengan program yang di gagas yaitu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di kawasan Kelurahan Tambaksari melihat Apa yang telah dilakukan sebelumnya untuk menyimpulkan bahwa hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusung Desa Tambaksari dapat dilihat melalui pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat. (Ananta and Kurniawan, 2021) Dari dua penelitian sebelumnya ini dapat ditarik garis besar, bahwasanya Undang-undang dan peraturan yang berlaku belum bisa berjalan maksimal pada masyarakat khususnya masyarakat kota Surabaya.

Oleh karena itu perlu perencanaan tata ruang kota dalam upaya penataan kawasan kumuh di kota Surabaya. Tindakan upaya penataan kawasan kumuh di Kota Surabaya, juga perlu dilakukan peningkatan kesadaran para warga juga sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di kawasan padat penduduk. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperkuat perencanaan ruang kota dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam setiap tahap perencanaan harus dilakukan secara matang dan berdasarkan hukum yang berlaku. Perencanaan tata ruang di kota Surabaya dituangkan kedalam bentuk peraturan kebijakan karena alasan hukum, sosiologis dan filosofis. Berkat proses pengambilan keputusan yang tepat dapat dipastikan masa depan kota Surabaya dalam penataan ruang akan berlangsung secara efektif (I Wayan Suweda, 2011). Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penulis mengambil judul **“Perspektif Hukum Dan Mekanisme Perencanaan Tata Ruang Permukiman Kumuh Kota Surabaya”** yang mana pokok permasalahan hukumnya adalah bagaimana hukum dan peraturan yang berlaku di Kota Surabaya terkait dengan perencanaan tata ruang permukiman kumuh dan bagaimana mekanisme hukum yang dapat dilakukan pemkot dalam menangani permukiman kumuh

Metode

Yuridis normative ialah sebuah pendekatan penelitian dengan mengedepankan bahan hukum tertulis peraturan yang berlaku. Pendekatan ini pula, sebuah penelitian dapat mendapat pertimbangan dari norma-norma hukum yang berlaku untuk mengatur perilaku manusia, karena sejatinya sebuah konsep hukum harus ditaati (Obligation) dan hukum harus dapat memberikan keadaan nyata pada (Rule of recognition). (Samekto, 2019) Secara umum metode ini melibatkan analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum, hirarki norma, struktur norma, prinsip-prinsip moral, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum itu sendiri. (Harman, As'ari and Afridawati, 2020) Nantinya pula pendekatan ini dapat digunakan sebagai pemecah dari masalah pada penelitian kali ini secara lebih kompleks dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik.

Sebab itulah peneliti lebih memilih metode yuridis normative untuk digunakan penelitian kali ini. Karena jika melihat secara tekstual pada undang-undang serta peraturan yang berlaku



masih banyak kekurangan dalam penerapan di masyarakat. Metode Yuridis normative pula peneliti dapat menganalisis dan melakukan evaluasi pada mekanisme penataan tata ruang kota Surabaya berdasarkan norma hukum yang relevan. Sehingga hasil dari peneliti ini memungkinkan menghasilkan jawaban yang akan dapat menjadi bahan pertimbangan dari peraturan yang berlaku untuk pemukiman padat penduduk yang tergolong kumuh di kota Surabaya.

Hasil Dan Pembahasan

Peraturan Terkait Dengan Perencanaan Tata Ruang Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya

Menurut ahli tata ruang kota bapak Sujarto yang mendefinisikan Tata ruang adalah susunan bentuk dan pola penggunaan lahan yang mewakili wadah kehidupan, yang meliputi lahan pertanian, ruang laut, dan ruang udara, termasuk tanah, air, udara, serta benda dan energi lainnya yang merupakan ruang sebagai satu kesatuan ruang dimana manusia dan makhluk hidup lainnya beraktifitas dan menjamin kelangsungan hidupnya. (Giyarsih, 2016) Perencanaan tata ruang sendiri bertujuan untuk menciptakan penggunaan lahan yang efisien, berkelanjutan dan fungsional. Ini termasuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pengembangan kawasan, menetapkan zonasi penggunaan lahan, mengembangkan transportasi, melindungi lingkungan, dan memetakan potensi wilayah.

Rencana tata ruang kota Surabaya didasarkan pada rencana pengembangan dengan menggambarkan penggunaan lahan yang diatur oleh zonasi, misalnya perumahan, komersial, industri, ruang hijau, dll. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik pemanfaatan lahan yang tidak tepat dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang ada. Selain aspek fisik, penataan ruang Kota Surabaya juga menyangkut aspek ekonomi dan sosial. Pemerintah kota berupaya mengembangkan kawasan ekonomi khusus, pusat komersial, dan pusat perbelanjaan untuk meningkatkan perekonomian kota. Selain itu, pengembangan perumahan yang layak huni, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta penyediaan taman dan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian dalam tata guna lahan Kota Surabaya.

Sudah ada beberapa peraturan ataupun undang-undang yang mengatur perihal tata ruang kota Surabaya. Beberapa peraturan yang mengatur ialah:

1. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG"(Republik Indonesia, 2007). Peraturan tersebut dapat memilah dan memecahkan suatu masalah secara luas. Dalam konteks mempelajari struktur permukiman kumuh Surabaya, hal ini memberikan dasar hukum untuk mengatasi masalah ini melalui rehabilitasi, pemindahan atau pengembangan kembali kawasan permukiman kumuh.
2. "PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2034."(Kota Surabaya, 2014) menyediakan kerangka terpadu untuk perencanaan penggunaan lahan di kota Surabaya. Peraturan zonasi ini mencakup aspek-aspek seperti zonasi, peruntukan lahan, rencana tata ruang dan rencana pengembangan kawasan.
3. "PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH



DAN PERMUKIMAN KUMUH.”(Kota Surabaya, 2018) Peraturan ini mengatur masalah kawasan pada penduduk dan permukiman kumuh di kota Surabaya. Oleh karena itu menjadi acuan penting karena mengatur tentang pencegahan, perbaikan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman kumuh.

Semenjak pandemic Covid-19 banyak masyarakat kota Surabaya yang kehilangan mata pencaharian. Efek terbesarnya dirasakan bagi masyarakat kota Surabaya yang berada pada kawasan padat penduduk, kebanyakan para perusahaan memutuskan hubungan kerja dikarenakan efek ekonomi yang merosot dan juga faktor kesehatan. Apalagi bagi mereka yang bertempat tinggal dikawasan padat penduduk pada saat itu akan lebih rentan terkena wabah Covid-19.(Gobel, 2022) Hilangnya pekerjaan ini yang membuat isu lingkungan kumuh kembali muncul. Meskipun data dari Table1 menyebutkan bahwasanya dari tahun 2019 - 2020 sudah tidak ada lingkungan kumuh di kota Surabaya, namun dapat kita ketahui kawasan kumuh di kota Surabaya kembali bangkit terutama setelah wabah Covid-19 yang melanda Indonesia.

Terdapat tujuh (7) tingkat keberhasilan suatu kawasan bisa dikatakan bebas dari perdikaat kumuh, beberapa hal tersebut adalah(Abdurrahman and Suriyani, 2022) :

1. Bangunan atau gedung

Jika pembangunan gedung tidak diatur dengan baik, maka dapat mengakibatkan pembangunan yang bertentangan dengan tata kota yang baik. sehingga menyebabkan bangunan yang tidak layak huni, kepadatan penduduk dan kurangnya ruang terbuka.

2. Akses Jalan

Koneksi jalan yang terbatas atau buruk dapat menghambat mobilitas penduduk. Jika penduduk tidak memiliki akses mudah ke jalan utama, mereka mungkin terbatas dalam mencari pekerjaan, pendidikan atau perawatan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan kendala ekonomi dan sosial serta memicu terbentuknya permukiman kumuh di dekat tempat yang lebih mudah dijangkau.

3. Tersedianya Air minum

Ketika akses ke air minum terbatas atau tidak memadai, orang akan mungkin bergantung pada sumber air yang tidak aman atau tidak sehat seperti air sungai yang tercemar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya air minum yang memadai dapat menyebabkan kesehatan yang buruk dan sanitasi yang tidak memadai serta memperburuk kondisi lingkungan.

4. Drainase

Drainase yang buruk dapat menyebabkan saluran air tersumbat atau tidak berfungsi. Akibatnya, limbah domestik dan air kotor tidak dapat mengalir secara merata dan cenderung membentuk genangan air atau sumur di sekitar pemukiman penduduk. Lingkungan yang kotor dan tidak sehat ini dapat mempengaruhi kualitas hidup warga dan menimbulkan lingkungan kumuh.

5. Pengelolaan air limbah

Limbah yang tidak dapat mengalir dengan bagus dikarenakan drainase yang buruk dapat merusak infrastruktur, termasuk rumah dan bangunan. Banjir yang sering terjadi dapat menyebabkan sanitasi yang buruk, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi bagi penduduk, serta berkontribusi pada pembentukan kawasan kumuh.

6. Pengelolaan sampah

Jika sistem pengelolaan sampah yang efektif tidak ada, penumpukan sampah dapat terjadi di daerah pemukiman. Sampah dimana-mana dan tidak ditangani dengan efektif dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat dan menarik hama seperti tikus dan serangga.



Akumulasi limbah jangka panjang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah lingkungan yang serius.

7. Proteksi kebakaran

Lingkungan kumuh cenderung memiliki risiko kebakaran yang lebih tinggi daripada lingkungan yang teratur dan normal. Konstruksi tiang pancang, kepadatan penduduk yang tinggi, aksesibilitas yang terbatas dan penggunaan bahan konstruksi yang berbahaya dapat menjadi alasan sebuah kawasan dapat dilabeli mudah terbakar. Perlindungan kebakaran yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko kebakaran, yang dapat menyebabkan kerusakan struktural, kematian, dan pembentukan permukiman kumuh akibat bangunan yang rusak atau tidak aman.

Masyarakat harus menyadari pentingnya permukiman kumuh dan dampak negatifnya bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi permukiman kumuh yang diinisiasi oleh pemerintah atau lembaga sejenis. Kota dapat berpartisipasi dalam perluasan dan kampanye informasi dan berpartisipasi dalam pemilihan solusi alternatif. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan, saran dan aspirasi mereka kepada pemerintahan setempat tentang kondisi lingkungannya. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diiringi oleh pemerintah dengan program-program seperti rehabilitasi rumah, pembersihan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur penunjang. (Christian, Bisatya and Maer, 2020) Selain itu juga pemerintah setempat dapat memberdayakan para warganya dengan pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan ekonomi.

Sehingga nantinya terdapat keberlanjutan dalam pemeliharaan lingkungan sekitar. Dikarenakan Masyarakat juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan hasil pemukiman kembali kumuh. Mereka harus memelihara infrastruktur yang dibangun dan melanjutkan praktik baik dalam pengelolaan limbah, sanitasi, dan kebersihan lingkungan. Pemeliharaan yang baik memastikan bahwa hasil pembersihan kawasan kumuh tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan peran aktif dan partisipasi masyarakat, (Mariano and Hikon, 2019) penataan kawasan padat penduduk yang termasuk kumuh agar dilakukan lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.

Mekanisme Hukum Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menangani Permukiman Kumuh

Datangnya para pendatang dari kota-kota kecil dan kabupaten di sekitar Surabaya menimbulkan persoalan baru. Masyarakat dihadapkan dengan keterbatasan suatu lahan dan juga harga tanah serta perumahan yang tinggi membuat para pendatang lebih memilih mendirikan tempat tinggal di tempat yang illegal ataupun tempat tinggal yang tidak layak, posisi inilah paling rentan untuk menciptakan lingkungan padat penduduk. Persoalan ini ditambah dengan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap pekerjaan, pendidikan dan pelayanan publik sering menyebabkan munculnya permukiman kumuh di daerah pinggiran. (Ervianto, 2019)

Penduduk berpenghasilan rendah memiliki kesempatan terbatas untuk menemukan perumahan yang layak dan harus mencari perumahan di komunitas yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan. Regulasi tata ruang dapat membantu memprediksi dan mengatur



pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan ke kawasan yang telah ditentukan, mengendalikan urbanisasi yang tidak terkendali dan menghindari terbentuknya permukiman liar atau kawasan yang tidak sesuai standar keamanan.(Imran, 2013)

Pemerintah kota Surabaya tidak tinggal diam dalam menanggapi permasalahan permukiman kumuh di daerahnya. Sudah ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang segala hal-hal yang menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Dan berikut adalah beberapa kebijakan yang dibuat:

1. Membuat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kota Surabaya dapat mengatur identifikasi, penilaian dan kinerja permukiman kumuh, termasuk tindakan rehabilitasi, pemukiman kembali atau pembongkaran.
2. Menerapkan Zonasi dan Tata Ruang, hal ini memungkinkan pemerintah kota Surabaya untuk dapat memaksimalkan kawasan lahan dan pemukiman kumuh untuk alihkan kepada tempat yang lebih layak seperti rumah susun.(Ikmal and Alam, 2019)
3. Pelibatan masyarakat untuk sadar lingkungan, sebuah lingkungan kawasan kumuh juga dipengaruhi dari tingkat kebersihan di daerah tersebut. Jadi sudah seharusnya masyarakat turut hadir untuk menjaga lingkungannya.
4. Penyediaan lapangan kerja terhadap masyarakat permukiman kumuh, masyarakat yang dapat bertumbuh ekonomi secara baik menyebabkan bertumbuh pula minat konsumtif terhadap barang dan jasa sehingga efek ini dapat membuat meningkatnya kemakmuran di lingkungan sekitar.(Ginting, 2020)
5. Penyediaan rumah susun oleh pemerintah kota surabaya sebagai kebutuhan akan hunian.

Permukiman kumuh di Surabaya dapat memberikan efek timbal balik yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar. Permukiman kumuh sering dicirikan oleh kondisi kehidupan yang buruk. Rumah-rumah tersebut rapuh, tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, dan tidak memiliki fasilitas dasar seperti air minum dan listrik. Ini berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Kepadatan penduduk pada kawasan kumuh ini dapat menyebabkan masalah sanitasi, penyebaran penyakit, dan meningkatkan risiko kebakaran dan bencana lainnya. Pemerintah Kota Surabaya dan berbagai dinas terkait terus berupaya mengatasi dampak negatif tersebut melalui berbagai program dan kebijakan pengelolaan permukiman kumuh seperti rehabilitasi, pemukiman kembali dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik.(Romdiati and Noveria, 2008) Tujuannya adalah memberikan sebuah pelayanan yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan di Kota Surabaya.

Pemerintah kota Surabaya perlu melakukan evaluasi dan pengawasan program penataan permukiman kumuh. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan lapangan, pengumpulan data, dan analisis kinerja program untuk mengukur efektivitas terkait kebijakan yang telah dibuat. Karena pada penelitian yang dilakukan sebelumnya memunculkan berbagai hasil dan saran yang berbeda dengan Table.1, berikut berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai kawasan kota Surabaya;

- 1) Kelurahan Putat Jaya “Eks Lokalisasi”
Menurut “Erlangga Zohal Saputro”(Saputro, 2022), berdasarkan 7 kriteria suatu permukiman dapat dikatakan kumuh yang dimana kawasan eks lokalisasi yang berada



kelurahan putat jaya dapat dikategorikan kawasan kumuh dengan melihat fakta terkini. Dengan Berbagai upaya pemerintah kota untuk membangun dan menormalisasi kawasan belum juga usai. Butuh beberapa tahun lagi sebelum semuanya kembali normal dan berhenti terlihat rapuh. Pemerintah tidak hanya harus meningkatkan sarana dan prasarananya, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang menurut penulis masih kurang dan terkesan percuma jika infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kota tidak dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik. masyarakat Warga sangat mendukung program Pemkot untuk menormalisasi lokasi ini, namun belum menunjukkan akan memelihara fasilitas yang telah disediakan Pemkot.

2) Kecamatan Wonokromo

Menurut “Valeria Ulu dan Nihayatus Sholicha” (Ulu, Sholichah and Fakultas, 2020), penelitian yang dilakukan oleh mereka berdua mengacu pada indikator hasil sebuah evaluasi dengan penguatan teori Willian N. Dunn. Bahwasanya penelitian yang di lakukan di kecamatan wonokromo kota Surabaya memuat hasil perlu adanya kebijakan terkait penambahan jumlah perbaikan rumah minimal 10 untuk sebuah permukiman kumuh di lingkungan yang cukup luas.

3) Kelurahan Sukolilo Baru “Kawasan Pesisir”

Menurut “Okta Viana Jionti Putri dan Ummi Fadlilah Kurniawati” (Putri and Kurniawati, 2022), penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sukolilo Baru merupakan kelurahan yang dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Kumuh Kota Surabaya menjadi prioritas utama. Konsep eco-settlement adalah konsep permukiman kumuh desa Sukolilo Baru dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan, berdasarkan kondisi kawasan pesisir yang ada dan konsep penataan permukiman kumuh. Yang dimana hasil dari wilayah Sukolilo Baru yang merupakan kawasan pesisir memiliki indeks 82,93%, yang mana memiliki arti cukup baik untuk memiliki nilai implementasi eco settlement.

4) Kampung 1001 Malam “Kelurahan Dupak”

Menurut “Sarah Hasna Fadilla” (Hasna Fadilla and Mardiani Zain, 2019), penelitian yang dilakukan di Kampung 1001 Malam memiliki hasil pemukiman dengan kategori layak sebesar 17%, kurang layak 71% dan tidak layak 12%. Yang dimana hal tersebut memili arti kawasan tersebut termasuk tempat tinggal yang kurang baik untuk dihuni dan termasuk kawasan kumuh.

5) Kelurahan Asemrowo

Menurut “Muhammad Kemal Ghifari” (Ghifari, 2021), Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan proses penanganan permukiman kumuh dengan melibatkan lembaga pemerintah kota dan masyarakat. Namun implementasi program dan kebijakan di kelurahan Asemrovo tidak berjalan kurang efektif. terdapat masalah yang wajib diatasi di perumahan kumuh. lokasi pemukiman yang sulit dijangkau, keterbatasan dana dan lain-lain, membuat Kawasan pemukiman Asemrovo tidak terpelihara di banding kawasan lainnya.



•
Evaluasi dan riset perlu dilakukan kembali oleh pemerintah kota Surabaya. hal ini untuk memahami pentingnya kemanfaatan tanah untuk tempat tinggal. Karena Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan penggunaan, alokasi, dan pemanfaatan lahan. Untuk kepentingan masyarakat kota Surabaya melalui berbagai kebijakan regulasi.(Supriyo, 2021) Perencanaan tata ruang yang baik membantu optimalisasi penggunaan lahan di Kota Surabaya.



Kesimpulan

Undang-undang dan peraturan Penataan Ruang telah memberikan kerangka hukum yang relevan untuk kebijakan tentang kawasan kumuh di Kota Surabaya. Perencanaan tata ruang permukiman kumuh kota Surabaya dalam jangka tahun yang lama telah ditetapkan agar memiliki Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Hal ini menjadi instrumen penting dalam mengatur tata ruang permukiman kumuh di Surabaya. Perencanaan tata ruang kota yang baik dapat membantu dalam menata permukiman kumuh kota Surabaya. Penataan permukiman kumuh merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan akses yang lebih baik bagi kota Surabaya.

Sedangkan Mekanisme hukum penataan ruang permukiman kumuh di Kota Surabaya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur, ruang hijau, dan aksesibilitas permukiman kumuh dapat meningkatkan penggunaan lahan, mengurangi pemborosan lahan, dan menghambat pembangunan permukiman kumuh baru. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan perumahan yang layak, infrastruktur dasar yang memadai, jaringan transportasi yang baik, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan penataan perumahan kumuh yang efektif, masyarakat dapat hidup lebih baik dan sejahtera. Evaluasi tersebut mengevaluasi pelaksanaan program, pencapaian tujuan permukiman kumuh dan dampak yang dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Sehingga Kesimpulan ini menggaris bawahi pentingnya penilaian berkelanjutan, kolaborasi dan tindakan yang tepat sasaran dalam penataan ruang permukiman kumuh dan padat penduduk di Kota Surabaya untuk hasil yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Artikel jurnal ini ditulis oleh Aulia Putri Universitas Muhammadiyah Surabaya berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Dalam Upaya Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya. Ucapan terima kasih saya berikan kepada Bapak Agus Supriyo selaku Dosen pembimbing kemudian kepada pihak Fakultas UMSurabaya dan juga pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mensupport baik dalam hal penelitian dan juga proses terbit jurnal ini melalui Program Seminar Nasional Hukum dan Pancasila. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman and Suriyani, E. (2022) 'Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Rayakecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong', *Japb*, 5(1), pp. 1-14.
- Agustina Melani (2020) *Data surabaya tingkat pengangguran terbuka di atas 5 persen*, *Liputan 6.Com*. Available at: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4154126/data-surabaya-tingkat-pengangguran-terbuka-di-atas-5-persen>.
- Ananta, I. and Kurniawan, B. (2021) 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA', *Publika*, 3.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (2021) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026*.
- Chandranegara, I. S. and Bakhri, S. (2021) 'TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL', *Jurnal Ius Constituendum*, 6, pp. 269-283.
- Christian, A. T., Bisatya, I. and Maer, W. (2020) 'Rusunawa Produktif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya', *JURNAL eDIMENSI ARSITEKTUR*, VIII(1), pp. 425-432.
- Ernawati, R. (2019) 'Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Tinggal pada Rusunawa di Kota Surabaya', *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 5(1), pp. 24-31. doi: 10.29080/eija.v5i1.527.
- Ervianto, W. I. (2019) 'Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan', *Jurnal Spektran*, 7(2), pp. 178-186.
- Ghifari, M. K. (2021) 'Implementasi Kebijakan Permukiman Kumuh di Kota Surabaya (Studi Kasus Permukiman kumuh di sekitar Sungai Kelurahan Asemrowo)', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* ..., 1(2). Available at: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jebaku/article/view/166>.
- Ginting, A. L. (2020) 'Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan', *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), p. 42. doi: 10.24252/ecc.v7i1.13197.
- Giyarsih, S. R. (2016) 'Koridor Antar Kota Sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi Yang Semakin Penting', *Tataloka*, 14(2), pp. 90-97.
- Gobel, F. F. (2022) 'Korelasi Identitas, Aktivitas dan Legalitas terhadap Munculnya Permukiman Kumuh Pasca Pandemi Covid-19', *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space : Journal of the Built Environment)*, 9(1), p. 73. doi: 10.24843/jrs.2022.v09.i01.p07.
- Harahap, F. R. (2013) 'DAMPAK URBANISASI BAGI PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA



- Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si □', *Jurnal Society*, I(1), pp. 35–45.
- Harman, R., Asa'ari, A. and Afridawati, A. (2020) 'Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif', *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1(02), pp. 90–97. Available at: <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/20>.
- Hasna Fadilla, S. and Mardiani Zain, I. (2019) 'Kajian Kondisi Fisik, Kondisi Sosial Dan Kondisi Ekonomi Di Permukiman Kumuh Kampung 1001 Malam, Dupak, Krembangan, Kota Surabaya', *Swara Bhumi*, 2(1), pp. 1–7.
- Hidayat, N. A. *et al.* (2017) 'ANALISIS SOLIDARITAS DAN SURVIVALITAS PEDAGANG MADURA DI PASAR TRADISIONAL SURABAYA', *Jurnal Trisula LP2M Undar*, 1(5), pp. 508–516.
- I Wayan Suweda (2011) 'Pembangunan kebijakan penataan ruang dalam konteks konsep kota berkelanjutan', *Jurnal Ilmiah teknik Sipil*, 15(2), pp. 231–244.
- Ikmal, M. and Alam, S. M. (2019) 'Kebijakan Zonasi dan Tata Ruang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Sumenep', *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora*, 3(1), p. 20. doi: 10.31604/jim.v3i1.2019.20-28.
- Imran, S. Y. (2013) 'Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo', *Dinamika Hukum*, 18(3), pp. 457–467.
- Iswantoro, C. and Anastasia, N. (2013) 'Hubungan Demografi, Anggota Keluarga dan Situasi dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan Pembelian Rumah Tinggal Surabaya', *Finesta*, 1(2), pp. 125–129.
- Kota Surabaya (2014) *PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2034*.
- Kota Surabaya (2018) *PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH*.
- Mariano, W. and Hikon, L. (2019) 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengubah Permukiman Kumuh Menjadi Destinasi Wisata', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), pp. 108–113. Available at: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1793>.
- Nazaruddin, T. (2018) 'Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal', *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 2(1), pp. 30–35. Available at: <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/791>.
- Putri, O. V. J. and Kurniawati, U. F. (2022) 'Penilaian Implementasi Konsep Eco Settlement pada Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir Kelurahan Sukolilo Baru Kota Surabaya', *Jurnal Teknik ITS*, 11(3). doi: 10.12962/j23373539.v11i3.98210.
- Republik Indonesia (2007) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG*. Available at: <http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf>.



- Republik Indonesia (2011) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.
- Romdiati, H. and Noveria, M. (2008) 'Mobilitas Penduduk Musiman di Kota Surabaya: Dampaknya Terhadap Lingkungan Permukiman Kumuh', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(1), p. 14.
- Samekto, F. A. (2019) 'Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis', *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), p. 1. doi: 10.14710/hp.7.1.1-19.
- Saputro, E. Z. (2022) 'Normalisasi Kawasan Kumuh Eks Lokalisasi Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya', *Jurnal Kajian Ruang*, 2(1), p. 19. doi: 10.30659/jkr.v2i1.20602.
- Sukrisdiyanto, W. and Setiadi, E. (2024) 'Strategi Penanganan BABS Melalui Penyediaan', *Jurnal Penataan Ruang*, 18(1), pp. 53-59.
- Supriyo, A. (2021) *Dinamika Perlindungan HAM Bagi Kaum Marginal Pasca Pandemi Covid Di Era Society 5.0*.
- Ulu, V., Sholichah, N. and Fakultas (2020) 'EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DI KELURAHAN NGAGELREJO, KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA', *Jurnal Aketik: Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1).

Artikel

by Aulia Putri

Submission date: 09-Jul-2023 03:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2128377373

File name: aul_untag.docx (124.15K)

Word count: 5057

Character count: 33743

Artikel

ORIGINALITY REPORT

15%	%	12%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
2	Kartono Kartono, Aji Mulyana. "The Implementation of Chemical Castration Penalties towards Paedophilia Crime Perpetrators", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	1%
3	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
7	Muhammad Kamal Hidjaz, Moch Andry W.W. Mamonto, Andika Prawira Buana. "Legal	<1%


Politics of Party Simplification in Indonesia: A Study Based on the Political Party Regulatory Model", International Journal of Criminology and Sociology, 2022

Publication

-
- | | | |
|---|--|------|
| 8 | Submitted to Universitas Amikom
Student Paper | <1 % |
|---|--|------|
-
- | | | |
|---|--|------|
| 9 | Wirawan ED Radianto, Yosefa Lianoto, Tommy Christian Efrata, Liliana Dewi. "The Role of Financial Literacy, Gender, Education, and Ethnicity towards Investment Decisions", KnE Social Sciences, 2020
Publication | <1 % |
|---|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 10 | I Hidayati. "Migration as a coping strategy of Indonesian farmers in the face of climate change", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 11 | Joko Adianto, Rossa Turpuk Gabe, Rini Kurniawati, Suciyhuma Armenda. "From Shelters for Numbers to Shelters for Welfare: Rectifying the Social Housing Provision Programme in Jakarta", Housing Policy Debate, 2021
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 12 | Shinta Amelia, Ertien Rining Nawangsari. "IMPLEMENTASI PROGRAM "URBAN FARMING" SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN | <1 % |
|----|--|------|

KEBUTUHAN PANGAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI DI KELURAHAN JERUK
KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA
SURABAYA)", Jurnal Governansi, 2021

Publication

-
- 13 Submitted to University of Nottingham <1 %
Student Paper
-
- 14 Sandi Fajar Rodiyansyah, Tantri Wahyuni. <1 %
"Kombinasi Kriptografi Diffie – Hellman,
Message – Digest 5 dan Rivest Chiper 4",
Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology
Journal of UMUS, 2020
Publication
-
- 15 Submitted to Surabaya University <1 %
Student Paper
-
- 16 Submitted to Universitas Khairun <1 %
Student Paper
-
- 17 Submitted to Universiti Teknologi Petronas <1 %
Student Paper
-
- 18 Vima Septia, Agus Supriyo. "PERLINDUNGAN <1 %
HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA
PRIBADI WAJIB PAJAK DAERAH DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA",
Mendapo: Journal of Administrative Law, 2023
Publication
-
- 19 Monalisa A. Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius <1 %
Purwanto. "Implementasi Kebijakan Kota
- 

Tanpa Kumuh Di Kota Manado (Studi Pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua)",
AGRI-SOSIOEKONOMI, 2022

Publication

20 RAHMAT ALI WIBOWO, DIKPRIDE DESPA, ALEXANDER PURBA. "Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Pringsewu.", Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), 2022

Publication

21 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

22 Alifah Shafina Ashabie, Yunita Ismail Masjud. "The Study of Biopore Infiltration Holes (BIH) Implementation to Reduce Waterlogging in President University Campus Area", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2022

Publication

23 Firman Hadi Rivai, Ridwan Rajab, Bambang Suhartono. "Implementation of Sustainable Development Policies in the Environmental Sector Based on e-Governance in Riau Province", KnE Social Sciences, 2023

Publication

24 Irfan Irfan, Mahludin H. Baruwadi, Sukirman Rahim. "Strategi Pengelolaan Kawasan



Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo",
LOSARI : Jurnal Arsitektur Kota dan
Permukiman, 2021

Publication

25 Junaidi Junaidi, Mila Surahmi, Desmawaty Romli. "Force Majeure or Hardship Principle In Termination of Employment During The Covid-19 Pandemic", SASI, 2022 <1 %

Publication

26 Submitted to Universitas Islam Bandung <1 %

Student Paper

27 Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo <1 %

Student Paper

28 Suprihatin -, Aprianto, Firman P, Yuniar KS, Alfenia A, Revianti KD. "Mengais Asa untuk Kampung 1001 Malam", Prapanca : Jurnal Abdimas, 2021 <1 %

Publication

29 Submitted to The Governing Body of the College of Business Education <1 %

Student Paper

30 Submitted to Universitas Papua <1 %

Student Paper

31 Submitted to Universitas Putera Batam <1 %

Student Paper

Submitted to UIN Walisongo

32	Student Paper	<1 %
33	Submitted to stipram Student Paper	<1 %
34	Agung Wardana. "Contemporary Bali", Springer Science and Business Media LLC, 2019 Publication	<1 %
35	Dewi Sukma Kristianti. "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2021 Publication	<1 %
36	"Sustainable Architecture and Building Environment", Springer Science and Business Media LLC, 2022 Publication	<1 %
37	Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %

38 Eny Apriyanti, Heru Susanto, I Nyoman Widiassa. "Development of Fly Ash Coal/TiO₂ Pored Composite Materials in The Making of Ceramic Membrane for Water Treatment Process", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021 <1%
Publication

39 I D M F Septanaya, P Navitas, M Yusuf, A M Navastara, S Faradisa, P K Stefanugroho. "Vulnerability assessment of public rental housing (Rusunawa) residents in facing the risk of COVID-19 transmission (Case study of Surabaya)", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021 <1%
Publication

40 Ainil Ma'sura, Suparji Suparji, Sadino Sadino. "KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU UMUMNYA PASAL YANG MENGATUR PERUNTUKAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2022 <1%
Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Seminar Nasional Hukum dan Pancasila
Vol. 2, 9 Juni 2023



Surabaya, 23 Juni 2023

Nomor : 20/K/FII/Semnas HP-2/VII/2023
Hal : Penerimaan Artikel Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila

Yth.
Bapak/Ibu
Aulia Putri, Agus Supriyo
di tempat

Terima Kasih Telah Mengirimkan artikel ilmiah dengan judul :

**Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Upaya
Penataan Permukiman Kumuh di Kota Surabaya**

Berdasarkan Hasil Review, Artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dalam Seminar Nasional Hukum dan Pancasila (Semnas HP-2) Vol. 2 No. 30.

Demikian Informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan Terima Kasih

Hormat kami,
Editor Semnas HP-2

Siltoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.